



Pengantar

ILMU PEMERINTAHAN

Tim Penulis

Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Meti Mediyastuti Sofyan, Natalia Heni, Rikki Maulana Yusup, Christina Bagenda, Monica Feronica Bormasa, Mohamad Hilal Nu'man, Latifah, Egidius Fkun, Unggul Sagena, Nanda Dwi Rizkia, Tati, Dortje L. Y. Lopulalan.



Pengantar

ILMU PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Meti Mediyastuti Sofyan, Natalia Heni,
Rikki Maulana Yusup, Christina Bagenda, Monica Feronica Bormasa,
Mohamad Hilal Nu'man, Latifah, Egidius Fkun, Unggul Sagena,
Nanda Dwi Rizkia, Tati, Dortje L. Y. Lopulalan.

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

**Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Meti Mediyastuti Sofyan, Natalia Heni,
Rikki Maulana Yusup, Christina Bagenda, Monica Feronica Bormasa,
Mohamad Hilal Nu'man, Latifah, Egidius Fkun, Unggul Sagena,
Nanda Dwi Rizkia, Tati, Dortje L. Y. Lopulalan.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-616-8

Cetakan Pertama:

Agustus, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Pengantar Ilmu Pemerintahan.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Pengantar Ilmu Pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan mengacu pada tindakan memerintah melalui lembaga atau organisasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan (tujuan nasional) pemerintahan negara. Untuk memenuhi tujuan pemerintahan negara, pemerintahan diartikan sebagai tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya. Manusia harus hidup berkelompok, dan dalam masyarakat ini, otonomi pribadi harus dipertahankan. Hal ini menuntut perlunya tata kelola. Seringkali ada tiga tingkatan pemerintahan di sebuah negara dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang luas: lokal, regional, dan nasional.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, peran pemerintah dalam kehidupan sosial telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Peran pemerintah sangat penting dalam membangun keamanan fundamental agar masalah agama dan kepercayaan diperhatikan, serta dalam mengelola ekonomi nasional dan saat ini memastikan keamanan kehidupan sosial. Pemerintah juga menjadi lebih canggih, kuat, dan menonjol karena masyarakat kita menjadi lebih kompleks. Ukuran, ruang lingkup, dan dominasi pemerintahan akan terus menjadi sumber perdebatan selama sisa sejarah umat manusia.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para

pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Agustus, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Pemerintahan	3
C. Ruang Lingkup Pemerintahan	10
D. Rangkuman Materi	13
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN	17
A. Pendahuluan	18
B. Sistem Pemerintahan Demokrasi	20
C. Sistem Pemerintahan Monarki	23
D. Sistem Pemerintahan Republik	26
E. Sistem Pemerintahan Oligarki	30
F. Sistem Pemerintahan Komunisme	31
G. Sistem Pemerintahan Teokrasi	34
H. Sistem Pemerintahan Anarki	37
I. Rangkuman Materi	38
BAB 3 PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU	43
A. Pendahuluan	44
B. Ilmu Pemerintahan Sebagai Disiplin Ilmu	47
C. Rangkuman Materi	58
BAB 4 SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN DAN ILMU PEMERINTAHAN	61
A. Pendahuluan	62
B. Definisi Negara	62
C. Definisi Pemerintahan dan Asas-Asas Pemerintahan	65
D. Sejarah Perkembangan Pemikiran Tentang Negara	67
E. Filsuf-Filsuf Pada Zaman Yunani Kuno	68
F. Sejarah Perkembangan Negara	72
G. Bentuk Negara Masa Sekarang	74
H. Paradigma Ilmu Pemerintahan	76

I. Bentuk Pemerintahan.....	78
J. Rangkuman Materi	79
BAB 5 FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN	83
A. Pendahuluan.....	84
B. Pengertian Filsafat.....	85
C. Pengertian Etika dan Moralitas	88
D. Etika Administrasi.....	91
E. Rangkuman Materi	94
BAB 6 HUBUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	97
A. Pendahuluan.....	98
B. Pengertian Pemerintah dan Rakyat dan Masyarakat.....	99
C. Peran Hubungan Masyarakat Terhadap Instansi Pemerintah.....	102
D. Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat	103
E. Rangkuman Materi	108
BAB 7 ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN.....	111
A. Pendahuluan.....	112
B. Pengertian Administrasi Pemerintahan	118
C. Birokrasi Pemerintahan	125
D. Proses Administrasi Pemerintahan	130
E. Etika dan Integritas Dalam Birokrasi Pemerintahan.....	134
F. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan.....	137
G. Perbandingan Sistem Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan ..	141
H. Rangkuman Materi	144
BAB 8 ORGANISASI PEMERINTAHAN	155
A. Pendahuluan.....	156
B. Budaya Organisasi Pemerintah.....	161
C. Penyakit Organisasi	163
D. Tantangan Organisasi	165
E. <i>New Public Management</i> (NPM).....	166
F. Organisasi Pemerintahan di Indonesia.....	168
G. Organisasi Pemerintahan di Indonesia.....	169
H. Rangkuman Materi	173
BAB 9 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	177
A. Pendahuluan.....	178
B. Pengertian Manajemen	182

C. Tujuan dan Fungsi Manajemen	187
D. Pengertian Pemerintahan.....	190
E. Pengertian Manajemen Pemerintahan	192
F. Tujuan Pemerintahan	194
G. Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen	197
H. Fokus dan Esensi Manajemen Publik	202
I. Manajemen Strategik	206
J. Tingkatan Manajemen.....	210
K. Orientasi Manajemen.....	213
L. Manajemen Kinerja	217
M. Manajemen Publik Baru	220
N. Implementasi <i>New Public Management (NPM)</i>	223
O. Rangkuman Materi	227
BAB 10 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN.....	233
A. Pendahuluan.....	234
B. Pengertian	235
C. Masalah Kepemimpinan Pemerintahan	239
D. Kepemimpinan Pemerintahan Yang Sukses	240
E. Rangkuman Materi	245
BAB 11 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN.....	249
A. Pendahuluan.....	250
B. Teori dan Konsep Kebijakan Publik	250
C. Perkembangan Teori Kebijakan Pemerintahan	253
D. <i>E-Government, Digital Governance</i> dan Kebijakan Berbasis Digital.....	256
E. Tantangan Kebijakan Pemerintahan	258
F. Rangkuman Materi	260
BAB 12 PERILAKU PEMERINTAH	265
A. Latar Belakang	266
B. Pengertian Perilaku Birokrasi	272
C. Faktor Perilaku Birokrasi di Indonesia	273
D. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	274
E. Budaya Organisasi dan Perilaku Pejabat Publik.....	276
F. Perilaku Birokrat Menentukan Kualitas Pelayanan Perizinan	277
G. Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi.....	279

H. Rangkuman Materi	283
BAB 13 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH.....	287
A. Evaluasi Kinerja	288
B. Pendekatan Evaluasi Kinerja.....	289
C. Sasaran Evaluasi	290
D. Metode Evaluasi	291
E. Ukuran Kinerja	292
F. Rangkuman Materi	293
BAB 14 KOMUNIKASI PEMERINTAHAN	295
A. Pendahuluan.....	296
B. Pengertian Komunikasi.....	297
C. Pengertian Pemerintahan.....	301
D. Paradigma Komunikasi Pemerintahan	303
E. Model Pendekatan Komunikasi Pemerintahan	310
F. Rangkuman Materi	314
GLOSARIUM	318
PROFIL PENULIS	324



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pelayanan publik, dan memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam interaksi pemerintah diberikan layanan sipil sehingga mereka dapat diberikan sesuai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang diperintah. Pemerintahan yang sebenarnya dalam pandangan Muhadam Labolo adalah usaha untuk hidup bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sejumlah faktor penting, termasuk tindakan (dinamika), organisasi fungsional, serta tanggung jawab dan wewenang, dapat digunakan untuk melihat tata kelola.

Manusia harus hidup berkelompok, dan dalam masyarakat ini, otonomi pribadi harus dipertahankan. Hal ini menuntut perlunya tata kelola. Seringkali ada tiga tingkatan pemerintahan di sebuah negara dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang luas: lokal, regional, dan nasional.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, peran pemerintah dalam kehidupan sosial telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Peran pemerintah sangat penting dalam membangun keamanan fundamental agar masalah agama dan kepercayaan diperhatikan, serta dalam mengelola ekonomi nasional dan saat ini memastikan keamanan kehidupan sosial. Pemerintah juga menjadi lebih canggih, kuat, dan menonjol karena masyarakat kita menjadi lebih kompleks. Ukuran, ruang lingkup, dan dominasi pemerintahan akan terus menjadi sumber perdebatan selama sisa sejarah umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, A. (2017). *Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik*. 108–109.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Ilmu Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2018). Birokrasi (Kajian Konep, Teori Menuju Good Governance). In *Unimal Press* (Vol. 1, Issue 1). Unimal Press.
- Nengsih, N. S., Irawan, B., Mustanir, A., Luturmas, Y., Yunus, N. R., Laratmase, K. A., & Kusnadi, I. H. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. UMSIDA Press.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. In *Alfabeta Bandung*. CV Alfabeta.
- Sufianto, D. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Setia.
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413–435. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Widodo, T. (2010). Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan. In *Journal Administrator Borneo* (Vol. 6, Issue 2, p. 4). <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/140/135>



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 2: SISTEM PEMERINTAHAN

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 2

SISTEM PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Di masa lalu, banyak negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti wilayah, budaya, dan kepercayaan agama. Di Yunani kuno, sistem pemerintahan populer dikenal sebagai demokrasi terbentuk di kota Athena pada abad ke-5 SM. Di sini, warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui sidang umum dan pengadilan. Di Roma Kuno, sistem pemerintahan republikan menggantikan pemerintahan monarki. Sistem ini melibatkan pemilihan wakil rakyat untuk mewakili kepentingan warga dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Di zaman pertengahan, kekuasaan di Eropa terpusat pada monarki. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol memiliki sistem pemerintahan monarki absolut di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak. Revolusi Amerika pada abad ke-18 melahirkan sistem pemerintahan republikan modern. Di sini, kekuasaan dipegang oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Di abad ke-20, komunisme muncul sebagai sistem pemerintahan baru di Uni Soviet. Di bawah sistem ini, kekuasaan dipegang oleh Partai Komunis, dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi. Hingga kini, sistem pemerintahan terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, (Christmas & Purwanti, 2020).

Latar belakang sistem pemerintahan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, agama, dan kepercayaan politik. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang sistem pemerintahan:

1. Sejarah: Sistem pemerintahan sering kali berasal dari warisan sejarah dan kebudayaan suatu negara. Misalnya, sistem pemerintahan di

DAFTAR PUSTAKA

- Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222–235. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.222-235>
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Palangkey, T. S. R. and R. D. (2021). Metamorphosis syi'ah: antara politik, mazhab, teologi dan konsep negara teokrasi. *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 2(2), 148–159. <https://doi.org/10.47323/ujss.v2i2.146>
- Pelu, H. D. A., Fenetiruma, R. P., Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2022). PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan (JCK)*, 10(1), 22–35. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5516>
- Puji Laksono. (2020). Komunikasi Massa Dan Demokrasi Dalam Arus Sistem Politik. *Mediakita*, 4(1), 62–73. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448>
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022).

Pengantar Ilmu Politik (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Subki, H. C. S. N. A. F. M. T., Nurdiansyah, M. I. M. P., & Ibrahim, M. R. P. M. A. A. M. A. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki* (A. I. Setiawan (ed.); Pertama). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Syauyid Alamsyah, & Nurdin. (2023). Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 3: PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU

Meti Mediyastuti Sofyan, S.Sos., M.AP.

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 3

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berawal dari pemikiran (Surianingrat, 1990) konteks pemikiran ini dipengaruhi oleh ruang, waktu, tempat, kondisi yang berubah, dan konteks bidang kajian ilmuwan (pendidikan). Sebelum kita mendalami persoalan metode sejarah untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan/atau menerapkan/menerapkan ilmu pengetahuan dalam pemerintahan, terlebih dahulu kita akan menyentuh persoalan yang berkaitan dengan metode penelitian dan metode ilmiah.

Untuk memahami identitas pemerintahan dari peristiwa dan kegiatan pemerintahan secara lebih khusus dari perspektif ilmu pemerintahan, analisis multidisiplin dari perspektif sejarah, sebaiknya merujuk pada beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan dari perspektif pemahaman. Status dari para ahli dengan latar belakang keilmuan yang beragam.

Sumantri (Inu, 2001: 97) memandang negara sebagai organisasi kekuasaan dari perspektif filsafat ilmu. Oleh karena itu, dalam organisasi negara selalu kita jumpai organ/perangkat yang mampu memaksakan kehendak siapa pun yang berada di dalam wilayahnya. Pakar hukum Hugo de Groot melihat negara sebagai persatuan yang sempurna bagi orang-orang bebas untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Coursehero.com, 2020)

Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, negara adalah masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah di suatu wilayah (Max Weber dalam Inu, 2001: 99). Sedangkan (ndraha, 2010) dengan latar belakang ilmu-ilmu dasar administrasi negara dan disiplin ilmu pemerintahan, mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (satuan kerja umum) berfungsi untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Coursehero.com. (2020). makalah-perkembangan-ilmu-pemerintahan. <https://www.coursehero.com/file/76423497/makalah-perkembangan-ilmu-pemerintahandocx/>.
- Dr. Titin Rohayatin, S. M. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Deepublish.
- Drs. Musanef. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- <https://rushdiezhhepa.wordpress.com>. (2012). Ilmu Pemerintahan Di Indonesia. <https://rushdiezhhepa.wordpress.com/2012/08/23/ilmu-pemerintahan-di-indonesia/>.
- Ndraha, T. (2000). *Diktat Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD.
- ndraha, T. (2010). *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prof. Drs. Soewargono, M. (1995). *Jati Diri Ilmu Pemerintahan Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Institut Ilmu Pemerintahan Di Jakarta Pada Tanggal 29 Mei 1995*. Jakarta.
- Safyle, I. K. (1952). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Surianingrat, B. (1990). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (<https://rushdiezhhepa.wordpress.com>, 2012)



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 4: SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN DAN ILMU PEMERINTAHAN

Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo

BAB 4

SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN DAN ILMU PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang multidimensional mempunyai berbagai segi dan sifat. Manusia secara kodratnya bersifat sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang saling bersinergi. Manusia tidak dapat hidup sendiri diperlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehendak maupun pilihan bebas yang dibatasi oleh ikatan sosial. Ikatan sosial tersebut yang membentuk organisasi dari yang paling sederhana sampai kompleks mulai dari relasi dalam pertemanan, pekerjaan, masyarakat sampai negara.

Fenomena negara terus berkembang sepanjang sejarah. Negara menjadi perpanjangan kesepakatan dari kontrak sosial antar masyarakat untuk menjamin dan memperoleh tujuan bersama. Tujuan bersama dalam negara dapat tercapai dengan baik jika terjadi integrasi antara pemerintahan dan masyarakat.

B. DEFINISI NEGARA

Perkembangan istilah negara dapat dibedakan secara etimologi dan formil materiil. Etimologi ialah ilmu yang membahas tentang asal usul kata. Istilah negara secara etimologi berasal dari bahasa Latin yakni status atau *statum*, bermakna keadaan yang tegak dan tetap. Makna istilah tersebut dalam sejarahnya pada abad ke-16 berhubungan dengan negara. Istilah negara secara etimologi dari kata status atau *statum* (Latin) yang mempengaruhi perkembangan istilah di negara lain diantaranya *La Stato* (Yunani), *E'tat* (Perancis), *State* (Inggris). Negara secara formil merupakan *Staat Overheid* sebagai pemerintahan. Negara secara materiil merupakan

DAFTAR PUSTAKA

- Garvey, James. 2019. *20 Karya Filsafat terbesar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haudi dan Wijoyo, Hadison. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Hakim, Atang Abdul dan Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Filsafat umum dari Metodologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusriyah, Sri. 2017. *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Nurwardani, Paristiyanti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti.
- Osborne, Richard dan Edney, Ralph. *Filsafat untuk pemula*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prakoso, Abintoro. 2020. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*
- Syafiie, Inu Kencana. 2019. *Filsafat Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, Alwi. 2014. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 5: FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN

Rikki Maulana Yusup, S.IP., M.AP.

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 5

FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Bagian ini akan membahas filsafat dan etika pemerintahan yang dapat kita tinjau dari beberapa sudut pandang seperti definisi, hubungan filsafat dan etika, dan pentingnya penerapan etika bagi manusia, khususnya penerapan etika bagi para administrator pemerintahan. Mengapa demikian? Karena konsep etika merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian filsafat sistematis sehingga akan merujuk pada persoalan – persoalan yang menyangkut moralitas yang berkembang dalam kehidupan manusia yang menjalar dalam segala ranah kehidupan manusia.

Andaikan seseorang memberikan suatu pertanyaan yang berhubungan dengan etis, kebanyakan orang mungkin akan beranggapan bahwa orang tersebut telah melakukan hal yang mundur (*setback*). Di zaman yang serba modern ini semua langkah gerak terasa sangat mudah dan fleksibel, sehingga pertanyaan- pertanyaan etis yang menghubungkan sikap atau perilaku manusia dengan nilai filosofis akan tampak begitu asing dan seolah – olah akan menghambat suatu kemajuan.

Kondisi yang semakin kompetitif yang serba hebat dan nilai – nilai ekonomis telah membuat manusia semakin terdesak oleh kebutuhannya, sehingga manusia melupakan kebutuhan – kebutuhan material lain yang sebenarnya justru lebih esensial. Banyak orang yang takut akan kehilangan waktu guna menghayati nilai – nilai hidup yang hakiki, beranggapan bahwa moralitas dan hambatan atas kemajuan merupakan suatu keniscayaan, bahkan setiap orang juga berpandangan bahwa sekali orang bertanya terkait masalah – masalah moral berarti harus berani menanggung resiko untuk berjalan sendiri melawan arus.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2020). *Filsafat Administrasi Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Arry Mth. Soekawaty. (2020). *Filsafat Administrasi (edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Djohan,Djohermansyah. & Milwan (2023). *Etika Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Gie, The Liang. (2014).*Etika Administrasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Thoha. M. (1990). *Aspek – Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 6: HUBUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 6

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Maka relevan pengertian hukum seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dalam KBBI juga menyebutkan Hukum berarti keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis (<https://ombudsman.go.id>>artikel)

Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roscoe Pound (1870-1964), pemikir mazhab hukum Anthro-Sociological Jurisprudence pertama kali menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dengan demikian Hukum Pelayanan Publik adalah produk hukum yang ditetapkan pemerintah dan parlemen yang memiliki kewenangan membentuk hukum agar penyelenggara pelayanan publik harus tunduk terhadap aturan hukum pelayanan public (<https://ombudsman.go.id>>artikel)

Sebelum terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009, citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih diliputi patologi birokrasi seperti pelayanan birokrasi yang lambat, kaku, bertele-tele, tidak kompeten hingga maraknya pungli pada lingkungan birokrasi. Pada tahun

DAFTAR PUSTAKA

- David dan Ted Gaebler. (1996). Mewirauhan Birokrasi. terj Abdul Rasyid. Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardjo, Jakop dan Saini. (1986). Antologi Apresiasi Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia. Obsome
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Putri Bela Oktaviani dalam <https://ppg.kemdikbud.go.id>>berita
- Muslimin B Putra dalam <https://ombudsman.go.id>>artikel
- <https://id.wikipedia.org/wiki>>humas
- https://ginanja.blogspot.com/2016/01/hubungan_masyarakat_pemerintah
- <https://tirto.id/pengertian-masyarakat-menurut>



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 7: ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

Monica Feronica Bormasa, S.Sos., M.Si.

Universitas Lelemuku Saumlaki

BAB 7

ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Administrasi dan birokrasi pemerintahan merupakan dua konsep penting dalam konteks pengelolaan negara dan pemerintahan. Administrasi pemerintahan merujuk pada serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, birokrasi pemerintahan mengacu pada struktur organisasi dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola administrasi dan menjalankan kebijakan publik.

Administrasi pemerintahan melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Aktivitas administrasi pemerintahan meliputi pengumpulan dan analisis data, pengambilan keputusan, pengaturan sumber daya, implementasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan tersebut. Administrasi pemerintahan bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan mencakup struktur organisasi, aturan, regulasi, dan prosedur yang mengatur hubungan antara berbagai unit dan individu dalam pemerintahan. Birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Birokrasi memiliki hierarki yang jelas, dengan tingkatan-tingkatan pejabat dan departemen yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu. Birokrasi juga melibatkan penugasan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Tujuan utama administrasi dan birokrasi pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, birokrasi sering kali dianggap sebagai sistem yang kompleks, lambat, dan rentan terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi

DAFTAR PUSATAKA

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Taylor & Francis.
- Denhardt, R. B., Denhardt, J. V., & Aristigueta, M. P. (2019). *Theories of Public Organization*. Cengage Learning.
- Denhardt, R. B., Denhardt, J. V., & Aristigueta, M. P. (2021). *Public Administration: An Action Orientation*. Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Ferlie, E., Lynn Jr, L. E., & Pollitt, C. (Eds.). (2017). *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Frederickson, H. G. (2010). *Ethics and Public Administration*. M.E. Sharpe.
- Frederickson, H. G. (2010). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. University Press of America.
- Freitag, A. R. (2019). *Ethics and integrity in public administration*. In *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe* (pp. 1015-1033). Palgrave Macmillan.
- GAO (United States Government Accountability Office). (2018). *Government Auditing Standards*. GAO Publication No. GAO-18-568G.
- Getha-Taylor, H., & Yang, K. (2010). *Citizens' Perceptions of Governmental Performance: Evidence for the Domains of Bureaucratic Responsiveness, Expertise, and Equity*. *Public Administration Review*, 70(5), 738-748.
- Grindle, M. S. (2007). *Good enough governance revisited*. *Development Policy Review*, 25(5), 553-574.
- Hall, R. H. (1995). *Organizations: Structures, Processes, and Outcomes*. Prentice Hall.
- Hill, M., & Hupe, P. L. (2009). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage Publications.
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons?*. *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Ingraham, P. W., & Lynn, L. E. (2017). *The Routledge Handbook of Comparative Public Administration*. Routledge.

- Inruh Neto, J., & Resende, R. (2018). *Ethics and Integrity in Public Administration: Concepts and Cases*. Routledge.
- Kickert, W. J. M. (2003). *Public Sector Institutions in Western Nations: Lessons for Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Lapsley, I., & Knipe, A. (Eds.). (2018). *The Routledge Companion to Performance Management and Control*. Routledge.
- Maesschalck, J. (2018). *Ethics, Integrity and Accountability in Public Sector: Practice and Lessons Learned from the OECD*. *European Journal of Risk Regulation*, 9(4), 738-743.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- Milakovich, M. E., & Gordon, G. J. (2012). *Public Administration in America*. Cengage Learning.
- Milakovich, M. E., & Gordon, G. J. (2012). *Public Administration in America*. Wadsworth Publishing.
- Mulgan, R. (2010). *Good Government: The Relevance of Political Science*. *British Academy*.
- OECD. (2005). *Governance in Transition: Public Administration Reforms in Eastern Europe and the Former Soviet Union*.
- OECD. (2017). *Recommendation of the Council on Public Integrity*.
- OECD. (2019). *Public Sector Reform: Key Concepts and International Frameworks*.
- OECD. (2021). *Public Sector Reform: Key Challenges and Trends*.
- O'Leary, R., & Bingham, L. B. (2012). *The Collaborative Public Manager: New Ideas for the Twenty-First Century*. Georgetown University Press.
- Peters, B. G. (2018). *Comparative Politics: Theory and Methods*. Palgrave Macmillan.
- Peters, B. G. (2018). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*. Routledge.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). *Politicians, Bureaucrats, and Administrative Reform*. Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Administration Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.

- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*. University of California Press.
- Rhodes, R. A. W., & van Thiel, S. (2013). *The Oxford Handbook of Political Science*. Oxford University Press.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2018). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. McGraw-Hill Education.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2019). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Shafritz, J. M., Hyde, A. C., & Parkes, S. J. (2019). *Classics of Public Administration*. Cengage Learning.
- Sharma, P., & Sarker, A. (2015). *E-Government Implementation: Process and Challenges*. Springer.
- Sharma, R. (2016). *Public Administration in Theory and Practice*. PHI Learning.
- Sharma, S. (2016). *Public Administration: An Introduction*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Stillman II, R. J. (2010). *Public administration: Concepts and cases*. Cengage Learning.
- Stillman II, R. J. (2015). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.
- Stillman, R. J. (2010). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert Jr, D. R. (2015). *Management*. Pearson.
- Thompson, D. F. (2000). *Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption*. Brookings Institution Press.
- Transparency International. (2020). *Building Integrity and Countering Corruption in Public Administration and Institutions*.

- Uhl-Bien, M., Schermerhorn Jr, J. R., & Osborn, R. N. (2006). *Organizational behavior (9th ed.)*. John Wiley & Sons.
- UN DESA. (2018). *United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies*.
- UNDESA. (2018). *Trends and Challenges in Public Administration. United Nations*.
- UNDP. (2016). *Challenges and Best Practices in Public Administration Reforms: Lessons Learned*.
- UNDP. (2017). *Strengthening the Role of the Public Service in Achieving the SDGs*.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2018). *E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies*.
- United Nations Public Administration Network (UNPAN). (n.d.). *E-Government: Information and Communication Technologies in Public Administration*.
- United Nations. (2018). *United Nations Public Service Awards: Successful Innovations in Public Governance for Sustainable Development*.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press.
- World Bank. (2016). *Public Sector Governance and Accountability Series: Preventing Corruption in Public Administration*.
- World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 8: ORGANISASI PEMERINTAHAN

Mohamad Hilal Nu'man, S.H., M.Kn.
Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 8

ORGANISASI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Jones, 2013). Dalam suatu organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dikoordinasikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Setiap organisasi apapun jenisnya membutuhkan aplikasi manajemen dalam mengelola tugas serta sumber daya yang dimiliki. Istilah manajemen atau pengelolaan sendiri adalah seni mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi infrastruktur, dan sumber daya lain yang ada di dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Yusup, 2012).

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu Negara merupakan suatu faktor yang penting dalam kemajuan suatu Negara. Dengan diterapkannya suatu pemerintahan yang baik maka potensi-potensi yang ada di Negara tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan efisien demi memajukan Negara tersebut. Indonesia sebagai suatu Negara berkembang dan memiliki banyak potensi saat ini selalu melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan demi memajukan Negara dan juga menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara intensif melalui instansi pemerintah yang berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang juga memegang kendali atas berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman atas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Masyarakat itu sendiri dalam hal ini merupakan pihak yang menerima pelayanan dan juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. (2001). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Penerbit STIE Yogyakarta.
- Denhardt, Janet V, and Robert B. Denhardt. (2003). *The New Public Service : Serving Not Steering*. Armonk, N.Y: M. E. Sharpe.
- Denhardt, Robert B. Dan Janet V. Denhardt. (2003). *“The New Public Service: An Approach To Reform”*. *International Review Of Public Administration* vol.8 (1).
- Ferlie Ewan et all. (1997). *The New Public Management In Action*. Oxford University Press.
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/>
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-organisasi-menurut-para-ahli/>
- <https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-organisasi-adalah-menurut.html>
- <https://www.seluncur.id/pengertian-pemerintahan/>
- Jones, Gareth, R, (2007). *Organizational Theory, Design, and Change* (5rd edition). *New Jersey: Pearson Education Inc.*
- Lubis, Mochtar. (2001). *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rhodes, R.A.W. (1994). *‘The Hollowing out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain’*, *The Political Quarterly*
- Yusup, P. M. (2012). *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Jakarta: Rajawali Pers.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 9: MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Dr. Ir. Latifah, M.T.

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 9

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Berbeda dengan kata pemerintah atau pemerintahan, orang sering dengan mudahnya menyebut sekaligus melekatkan kata manajemen pada sebuah kegiatan yang dilakukan yang melibatkan sebuah kerja sama dengan orang lain untuk sesuatu tujuan yang diharapkan. Menurut mereka kata manajemen itu tidak sekedar kegiatan pengelolaan, tetapi merupakan penggunaan teknik dan prinsip tertentu yang diharapkan dapat memudahkan dalam mencapai tujuan. Manajemen mereka adalah alat yang digunakan untuk memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika kegiatan itu dilakukan asal saja

Menurut pendapat kebanyakan orang, kata manajemen bukan sesuatu yang asing, karena ia ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan dalam lingkup yang paling sederhana, mereka mempraktikkan apa yang disebut “manajemen” dalam kehidupan kesehariannya. Begitu juga kata pemerintah atau pemerintahan, dalam konteks yang lain bukan sesuatu yang asing. Hampir setiap hari semua orang terlibat secara langsung atau tidak langsung yaitu ketika berurusan dengan pemerintah atau proses pemerintahan. Suka atau tidak suka mereka berurusan dengan aparat pemerintah, begitu juga dengan manajemen harus digunakan sebagai suatu cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Bagaimana jika kedua kata yang populer yaitu manajemen dan pemerintahan itu digabungkan menjadi satu frasa berupa manajemen pemerintahan? Sudah pasti penggabungan keduanya akan menghasilkan sesuatu yang teramat penting. Penggabungan keduanya sebuah kebutuhan. Meskipun bagi sementara orang masih kedengaran asing di telinga mereka, tetapi sesungguhnya dapat dimengerti. Sekalipun masih terdengar kurang akrab di telinga jika dibandingkan dengan masing-

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gore. 1996. *The best Kept, Secrets In Government, National Performance Review*, Washington DC.
- Farnham, David dan Sylvia Horton, 1992, *Management in Public Service*, The Mac. Millan Press, London
- Frederickson, H. G, 1998, *The Spirit Public Administration*, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco
- Handoko, T. Hani.1995. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Heene, Aime dkk, 2010, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Hughes, E.Owen, 1998, Public Manajemen and Administration; An Introduction*, Second Edition, Mac Millan Press, Ltd : London.
- Kooiman, Jan, ed.,1994. *Modern Governance: New Government –Society Interactions*, London: SAGE Publications.
- Kristiadi, JB, 1994. *Administrasi-Manajemen Pembangunan*, Jakarta; LANRI
- Manulang, M., 197. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Pembangunan: Jakarta*
- ,1983, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia; Jakarta
- Mohamad, Ismail, et.2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Moses N. Kiggundu,1994, *Managing Organizations in Developing Countries, An Operotional Strategic Approach*, Kumarian Press, USA
- Osborne, David; Gaebler, Ted. 1992. *Reinventing Government, How The entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Jakarta: Pustaka Budiman Presindo.
- Osborne, David; dan Plastrik, Peter, 2001, *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, PPM: Jakarta.
- Oey liang Lee, *Pengertian Manajemen*, Balai Pustaka Administrasi, UGM
- Rasyid, M Ryaas, 1999, *Makna Pemerintahan*, Yarsif Walampone: Jakarta, Desember 1997.
- Ramto, Bun Yamin, 1997, *Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial dan Global*. Pidato Penguhan Guru Besar dalam Ilmu Pemerintahan, FISIP-UNPAD, 13

Siagian, Sondang P, 1993, *Administrasi Pembangunan*, Cetakan ke 16, Jakarta: Gunung Agung

Suradinata, Ermaya, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Ramadhan Bandung

—————,1998, *Organisasi dn Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*, Bandung CV. Ramadhan.

Supriatna, Tjahya. 2017. *Epistimologi Pemerintahan*, PT. Granesia Bandung



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 10: KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Dr. Egidius Fkun, S.Fil., M.Si.

Universitas Timor

BAB 10

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Kehidupan dunia dewasa ini yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi memunculkan dua fakta bagi kehidupan manusia. Pertama, pekerjaan manusia menjadi mudah karena adanya bantuan teknologi. Bahkan manusia perlahan-lahan dibentuk menjadi makhluk instan karena dapat melakukan berbagai hal dan memperoleh banyak hal dengan lebih gampang dengan memanfaatkan teknologi. Kedua, daya saing dan daya juang manusia menjadi lemah karena tidak didukung dengan pengetahuan yang mumpuni berhadapan dengan kemajuan teknologi tersebut. Bahkan manusia akhirnya tergerus, terbelakang dan tergilas karena bergerak lamban merespon kemajuan tersebut.

Perkembangan teknologi tersebut sudah merasuki seluruh sendi kehidupan manusia dan membuat manusia seakan sangat bergantung pada teknologi tersebut. Bahkan keberadaan manusia diukur dengan seberapa jauh teknologi tersebut dikuasai. Berhadapan dengan kenyataan ini maka upaya untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas dirinya menjadi sebuah hal yang mutlak bagi manusia. Manusia harus terus membaharui dirinya untuk dapat memposisikan diri secara baik dan benar dalam dunia yang makin mengglobal.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan dunia yang makin mengglobal menciptakan kemudahan sekaligus tantangan bagi upaya terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan bangsa yang utuh dan masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tanggung jawab Negara dan menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran seorang

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2017. *Leadership Ilmu Dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Effendi, Khasan. 2015. *Pimpinan Dan Kepemimpinan Pemerintahan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Ermaya, Suradinata. 2016. *Analisis Kepemimpinan: Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint.
- Fajriya, Ria Nur, Machdum Bachtiar, Anis Fauzi, and Iis Sholihat. 2023. "Karakteristik Kepemimpinan Kyai Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila." 2(1): 58–67.
- Firdaus. 2016. *Kepemimpinan Kewirausahaan Dalam Pengelolaan Organisasi Berbasis Kinerja*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Garis, Regi Refian. 2018. "Kepemimpinan Pemerintahan Pada Era Globalisasi (Kajian Tentang Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, No 1: 1–11.
- Haris, Al. 2017. *Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Kinerja*. ed. Rochayati Basra. Merangin.
- Hekmatullah, Sidik, Alafta Aulia, Ade Rizki Oktavian, and Retno Purwani Setyaningrum. 2021. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila (Building Leadership Based on Pancasila Values)." 1(1): 169–82.
<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas169>.
- Kariadi, Dodik, and Wasis Suprpto. 2017. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 5740(1).
- Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugina, Gina, Asep Suryana, and Eka Prihatin. 2016. "Pengaruh Orientasi Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung." *Adpend* 1(1): 71–79.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jurnaladpend/article/view/3754>.

- Supriyono, Supriyono, and Muhammad Mona Adha. 2020. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural." *Jurnal Kultur Demokrasi* 9(2): 2746–49.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. ed. Aep Gunarsa. Bandung.
- Syukri, Ahmad et al. 2019. "Sifat Empati Pemimpin Terhadap Bawahan Sebagai Kunci Keberhasilan Kepemimpinan Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Islam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 2(1): 43–52.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 11: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Unggul Sagena, MPP., M.A., M.A.Tech.

Universitas Indonesia/*Southeast Asia Freedom of Expression Network*

BAB 11

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Dalam studi mengenai pemerintahan, tidak terlepas dengan salah satu fungsi utama pemerintah yang itu membuat kebijakan. Untuk itu, kebijakan pemerintahan merupakan salah satu aspek yang perlu dibahas dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan ini. Secara umum, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kepentingan publik sehingga lebih populer disebut sebagai kebijakan publik (public policy). Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep dan teori kebijakan, implementasi kebijakan dalam pemerintahan, serta isu dan tantangan kebijakan pemerintahan saat ini, khususnya dalam konteks lokal dan nasional Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

B. TEORI DAN KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan bidang yang kompleks dan multidisiplin yang mempelajari proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah. Teori dan konsep kebijakan publik memiliki peran penting dalam memahami dinamika kebijakan, menganalisis efektivitas kebijakan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik dengan tepat, teori dan konsep yang mendasarinya perlu dipahami dengan baik. Pada bagian ini akan lebih lanjut membahas beberapa teori dan konsep utama dalam kebijakan publik, yaitu teori/model rasional, teori/model inkremental, teori kelompok kepentingan, dan paradoks implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadwick, A., & May, C. (2003). *Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: E-Government in the United States, Britain, and the European Union*. *Governance*, 16(2), 271-300. <https://doi.org/10.1111/1468-0491.00216>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dror, Y. (2017). *Public Policy-making Reexamined*. eBook Edition. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315127774>
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis*. 6th edition. Routledge.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. *Brookings Institution Press*.
- Heeks, Richard, *Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?* (February 18, 2003). iGovernment Working Paper no. 14, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3540052> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3540052>
- Huda, M., & Yunas, N. S. (2016). *The Development of e-Government System in Indonesia*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 8(1), 97-108. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.97-108>
- Lindblom, C. E. (1959). *The science of "muddling through"*. *Public administration review*, 19(2), 79-88.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. *Russell Sage Foundation*.
- Marsh, D., & Rhodes, R. A. W. (Eds.). (1992). *Policy Networks in British Government*. *Oxford University Press*.
- Olson, M. (1971). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. *Harvard University Press*.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. *Open University Press*.

- United Nations. (2018). *E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformational Sustainable Development*. United Nations.
- Utama, A. G. S. (2020). *The implementation of e-government in indonesia*. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 190–196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Weber, M. (1922). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Weber, M. (1946). *Bureaucracy*. In *From Max Weber: Essays in Sociology*. Oxford University Press
- West, D. M. (2005). *Digital Government: Technology and Public Sector Performance*. Princeton University Press.
- Wilson, W. (1887). *The Study of Administration*. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197-222.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 12: PERILAKU PEMERINTAH

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 12

PERILAKU PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi pemerintahan modern. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara demi kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya pemberian pelayanan merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan. Dimana fungsi penting pemerintah adalah sebagai regulasi, proteksi dan sebagai distribusi. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini masih terlihat dari masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Prosedur tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. (Kiki Endah, 2018)

Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nurrahman, Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.2, No.2, November 2020.
- Burhanudin Abubakar, Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,
- Dede Mariana Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.10, No.3, 2008.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Irfan Setiawan, Christian Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol.4, No.2, Oktober, 2022
- Iwan Satibi, Etika dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance, *Jurnal Academia Praja*, Vol.3, No.2, 2020.
- Kiki Endah, Etika Pemerintah Dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.1, 2016.
- Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhalindo.
- Mas'oed, Mohtar. 2008. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maxi Egeten, Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Murdiana Asih Heningtyas, Sjamsiar Sjamsuddin, Minto Hadi, Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Nunung Munawaroh, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Media Birokrasi — Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.*
- Onno Sahlania Hamzah, Prilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Puskesmas di Kota Makasar, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol.4, No.1, 2014.

- Said, M, Mas'ud, Birokrasi di Negara Birokrasi, Malang, Penerbit UMM Press, 2007.
- Sautarto, Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993
- Titin Rohayatin, Faktor Penyebab Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan, Jurnal Caraka Prabu, Vol.01, No.01, 2017.
- Tiwi, Perilaku Birokrat Menentukan Kualitas Pelayanan Perizinan, Universitas Muhamadiyah Makasar, 2023
- Toha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 13: EVALUASI KINERJA PEMERINTAH

Tati, S.Pd., MPA.

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 13

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH

Newstrom dan Devis (1997:173) dalam buku Manajemen Kinerja edisi kelima yang ditulis oleh Prof. Dr. Wibowo, SE M.Phil memandang evaluasi sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya.

Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi *reward*. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kerjaan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja. (Wibowo, 2016, p. 123)

Dengan demikian, evaluasi merupakan manajemen informasi penting untuk membuat keputusan strategis tentang kemajuan, retensi, atau pembagian karyawan. Evaluasi menghubungkan pelatihan dan pengembangan dengan karir perencanaan dan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang suatu lembaga.

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran tertentu. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa dating (Neta, 2017)

Pada e-book *Human Resources Management* yang kemudian diterjemahkan penulis, *evaluation performance* dalam proses strategi manajemen sumber daya manusia atau *Streategy Human Resources Management* merupakan bagian dan diskursus pokok dari tahapan perencanaan sumber daya manusia. Secara spesifik melalui inventarisasi data dengan mengumpulkan informasi ringkasan: seperti karakteristik

DAFTAR PUSTAKA

- Ichda Apriliana Lutfi, D. E. (2020, April 1). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikumro Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 79-86. doi:<http://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i1.309>
- Neta, Y. (2017). Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pynes, J. E. (2009). *Human Resources Management for Public and Non Profit Organizationalns*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja Edisi 5*. Jakarta: PT Kaja Grafindo.



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

BAB 14: KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Dr. Dra. Dortje L. Y. Lopulalan, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Pattimura.Ambon.

BAB 14

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal.

Berbicara kondisi komunikasi pemerintahan di era reformasi dewasa ini dengan segala implikasinya, terkesan tidak menerpa kepada substansi tujuan keberadaan pemerintahan secara umum karena telah banyak terkontaminasi dalam pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, makna komunikasi yang disampaikan komunikator pemerintah tidak di persepsi sama oleh komunikan atau masyarakat.

Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparaturnya pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya. Persoalannya adalah bagaimana dan mengapa isi materi komunikasi pemerintah di tengah era transparansi informasi, perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, belum komunikatif dan terkesan banyak disamarkan

Ulasan ringkas komunikasi pemerintahan di atas memberikan gambaran tentang fokus bahasan bab 14. Materi yang disajikan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang komunikasi pemerintahan. Akan diuraikan beberapa konsep dan pengertian komunikasi dan pengertian pemerintahan, serta mengenal paradigma komunikasi pemerintahan dan model komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gondokusumo. (1980). *Komunikasi Penugasan*.
- Berlo, David K. (1975). *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. Holt, Rinehart and Winston,.
- Effendy Onong Unchayana. (1993). *Teori & Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Erliana Hasan. (2010). *Komunikasi Pemerintahan*. Universitas Terbuka,.
- Finer, Samuel Edward. (1974). *Comparative Government*. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd.
- George R Terry. (2013). *PRINSIP PRINSIP MANAJEMEN* (Cetakan: ke-12). BUMI AKSARA.
- Gerhard J. Hanneman, William J. McEwen. (1975). *Communication and Behavior: Vol. Volume 10*. Addison-Wesley Publishing Company, 1975.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.Jr,. (1984). *Organisasi dan Manajemen": Perilaku, Struktur dan Proses* (Edisi Keempat). Penerbit Erlangga.
- Goyer RS. (1970). *Communication, Communicative Process, Meaning: Toward a Unified Theory*.
- Harold Koontz, Cyril O'Donnell, Heinz Wehrich. (1996). *Manajemen jilid 1* (Ed.Ke-8). Erlangga.
- Hovland, Janis and H.H. Keleey. (1953). *Communication and Persuasion*. New Heaven, Com: Yale University Press.
- Kincaid D. Lawrence. (1977). *Azas-Azas Komunikasi Antar Manusia*. LP3ES,.
- Max Siporin. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. MaxMillian.
- Michele Tolela Myers, Gail E. Myers. (1982). *Managing by Communication: An Organizational Approach* (illustrated ed.). McGraw-Hill,.
- R. Wayne. (1998). *Komunikasi organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. REMAJA ROSDAKARYA.
- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. *The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 91(1), 93-114.

- S. Pamudji. (1985). *Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*. Bina Aksara.
- Silalahi, Ulbert. (1992). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi*. Sinar Baru.

PROFIL PENULIS

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si.



Penulis pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia. Pengalaman penelitian - Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 50-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Penulis juga adalah seorang *Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer* beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, *Editorial Board & Editor in Chief* di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam *Ranking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1* tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 38, i10-Index 64. Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan

Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026. Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index: 1, G-index: 1, i10-index: 0*)

Google Scholar ID: srl7FjoAAAAJ (*H-index: 38, G-index: 1, i10-index: 64*)

Wos Researcher ID: R-6549-2016 (*H-index: 1, G-index: 2, i10-index: 0*)

SINTA Author ID: 6007675 (*Sinta score 3 years: 903, allyears: 4.604*)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate : <https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website: <https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (Wa Unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

Meti Mediyastuti Sofyan, S.Sos., M.AP.



Penulis lahir di Kota Bandung, 28 Desember 1976. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Pasundan Bandung dengan konsentrasi Kebijakan Publik pada tahun 2013. Bergabung dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) tahun 2020, *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)*, Asosiasi Dosen PKM Indonesia (ADPI) sejak tahun 2021 sebagai *Reviewer*, ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2016 sampai sekarang. Berbagai tulisan artikel jurnal ilmiah dan bisa dilihat juga di google scholar, juga aktif di Organisasi Relawan TIK Indonesia dari 2013-sekarang, aktif partisipasi menjadi Narasumber Makin Cakap Digital serta narasumber lainnya terkait Digitalisasi, selain itu penulis sambil berbisnis hijab @mestyle.scraft. Bisa hubungi di meti.media@umbandung.ac.id dan sosial media @metimediya

Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil.



Penulis berasal dari Banyumas, menamatkan sekolah menengah atas di Banyumas. Penulis menamatkan pendidikan S1 dan S2 pada fakultas Filsafat UGM. Penulis berprofesi sebagai dosen sejak tahun 2017 pada perguruan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) di Yogyakarta. Penulis beberapa kali menjadi dosen tamu pada perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta.

Rikki Maulana Yusup, S.IP., M.AP.



Penulis lahir di Kota Bandung pada tanggal 05 November 1986 memperoleh gelar S1 dari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD pada tahun 2010 dan mendapatkan gelar magister (S2) Administrasi Publik FISIP UNPAD pada tahun 2015. Awal karirnya dimulai pada tahun 2010 s/d 2013 sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan *finance* dan kembali meniti karir di salah satu perusahaan BUMN di Kota Bandung pada tahun 2014 s/d 2016. Saat ini penulis berprofesi menjadi salah satu dosen di Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Dasar – Dasar Logika, Asas – Asas Manajemen, Filsafat Administrasi Publik, dan Etika Administrasi Publik. Selain aktif sebagai seorang dosen penulis pun saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.



Penulis lahir di Bandung 54 tahun yang lalu. Ibu dua anak ini menyelesaikan pendidikan formal SD dan SMP di Magelang dan Palopo, SMA di Pinrang. Menyelesaikan S1 (Sarjana Hukum) di Universitas Kristen Indonesia Paulus Ujung Pandang dan Magister Hukum (M.H) di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis juga mengikuti Pendidikan Ahli Hukum Kontrak (C.P.C.L.E) dan sebagai salah satu anggota dalam ahli hukum kontrak. Bergabung di Universitas Flores tepatnya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores dari

tahun 2003 sampai dengan sekarang. Selain mengajar, penulis juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya sebagai pengurus P2TP2A Kab. Ende. Dan juga aktif mengikuti beberapa pelatihan/pendidikan lainnya. Aktif dalam kolaborasi penulisan buku (Book Chapter) di berbagai penerbit. Dan juga melaksanakan Penelitian dan pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma PT selain pengajaran/Pendidikan. Menulis artikel di jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2,3,4) dan internasional. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com.

Monica Feronica Bormasa, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Larat, 13 November 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki, dan melanjutkan S-2 pada Universitas 45 Makassar. Penulis pernah menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki sejak tahun 2015-2022, dan pada saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Lelemuku Saumlaki. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala LPM STIA Saumlaki tahun 2015-2017, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga tahun 2017-2019, dan Wakil Ketua II STIA Saumlaki tahun 2019-2020.

Mohamad Hilal Nu'man, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Bandung, 10 Desember 1979. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi Hukum Kenotariatan pada tahun 2019. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelum bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, saya pernah bergabung di persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai dengan tingkat wilayah, baik pada tahap pelajar, pemuda dan di Muhammadiyah itu sendiri. Selain itu juga pernah aktif dan pernah menjabat sebagai wakil

sekretaris ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan pernah bekerja di kantor konsultan hukum dan kantor notaris.

Dr. Ir. Latifah, M.T.



Penulis lahir 18 April 1962 di Indramayu, Provinsi Jawa Barat, aktif sebagai dosen Program studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora pada Universitas Muhammadiyah Bandung. Pendidikan Formal: Strata Satu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Statistik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, Strata Dua pada Pascasarjana program studi Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014.

Dr. Egidius Fkun, S.Fil., M.Si.



Penulis lahir di Kiupukan tanggal 24 September 1984. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S.Fil) pada Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang Tahun (2009). Magister Sains (M.Si) Ilmu Pemerintahan pada STPM “APMD” Yogyakarta (2011). Menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran Bandung (2023). Pada tahun 2017 diangkat menjadi dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fajar Timur Atambua. Sejak tahun 2018, menjadi dosen tetap di Universitas Timor. Penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Unggul Sagena, MPP., M.A., M.A.Tech.



Penulis adalah Sarjana Sosial FISIP Universitas Indonesia, sejak S1 pernah menjadi Ketua Forum Studi Kebijakan (*Forum for Policy Studies*) Ilmu Administrasi Negara FISIP UI. Konsultan dan peneliti pemerintahan digital dan tatakelola Internet. Saat ini selain mengajar di UI untuk mata kuliah program vokasi yaitu teknologi informasi dan digitalisasi industri pariwisata, juga peneliti independen interseksi kebijakan teknologi & masyarakat sipil (*technology & society*) di lembaga non profit regional *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet). Memperoleh gelar masters di bidang kebijakan publik (*master of public policy*), tatakelola teknologi (*master of arts in social sciences - technology governance*) dan studi teknologi dan masyarakat (*master of arts in NGO & Civil Society Studies*) dan pertukaran mahasiswa di tiga negara di Indonesia, Eropa dan Asia Timur. Hal ini didapat dengan beragam beasiswa seperti LPDP, Uni Eropa, May18, dan Erasmus Exchange. Mendapatkan Fellowship pada *Asia Pacific Region Internet Governance Forum* (2021) dan *Asia Pacific School on Internet Governance* (2018) dan anggota *Multistakeholders Advisory Group* (MAG) APriGF. Alumnus Kuliah Online Politik Indonesia (KOPI), dan MicroMasters Kebijakan Publik, sejak 2023 menjadi anggota Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI). Penulis dapat dihubungi pada kontak email unggulsagena@ui.ac.id | unggulsagena@gmail.com

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan Hukum Bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu

Sosial dan Manajemen STIAMl, Depok. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis, Hukum Pasar Modal, Hukum Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Pajak, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Hukum Perdata Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Tati, S.Pd., MPA.



Penulis adalah seorang Ibu satu anak yang lahir di Indramayu 06 Februari 1996. Ia merupakan seorang pendidik di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, aktivis Muhammadiyah dan media massa. Tulisannya dapat ditemui di berbagai laman terkenal dengan nama pena Immawati Tati atau Tati Sedfar. Dapat dihubungi di berbagai media sosialnya di @tatisedfar.

Dr. Dra. Dortje L. Y. Lopulalan, M.Si.



Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Ambon, dengan bidang konsentrasi pada Komunikasi Pembangunan dan Budaya. Hasil penelitian yang penulis hasilkan dan telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Prosiding Nasional maupun Internasional, diantaranya:

The Existence and Changes In The Use Of Local Language In The Family In The Middle Of The Current Modernity (An Analysis Study In Maluku Community), The Analysis of Social and Genetic Relationship Changes Among Buru Community from Contemporary Perspective. Bialahin Concept:

Reflections on the Unity of the Buru People in Maluku, Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Industrialisasi Media, Strategi Komunikasi Adaptif Masyarakat Pesisir di Taniwel Timur, Mengemas Konten Lokal Dalam Pelestarian Budaya Pada Stasiun NetTV Ambon, Gender dan Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Pesisir Kota Ambon.

Pengantar

ILMU PEMERINTAHAN

Dalam arti luas, pemerintahan mengacu pada tindakan memerintah melalui lembaga atau organisasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan (tujuan nasional) pemerintahan negara. Untuk memenuhi tujuan pemerintahan negara, pemerintahan diartikan sebagai tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya. Manusia harus hidup berkelompok, dan dalam masyarakat ini, otonomi pribadi harus dipertahankan. Hal ini menuntut perlunya tata kelola. Seringkali ada tiga tingkatan pemerintahan di sebuah negara dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang luas: lokal, regional, dan nasional.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, peran pemerintah dalam kehidupan sosial telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Peran pemerintah sangat penting dalam membangun keamanan fundamental agar masalah agama dan kepercayaan diperhatikan, serta dalam mengelola ekonomi nasional dan saat ini memastikan keamanan kehidupan sosial. Pemerintah juga menjadi lebih canggih, kuat, dan menonjol karena masyarakat kita menjadi lebih kompleks. Ukuran, ruang lingkup, dan dominasi pemerintahan akan terus menjadi sumber perdebatan selama sisa sejarah umat manusia.